



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon. (0711) 581077 Faksimile (0711) 580053
Laman : lppm.unsri.ac.id Surel : lppm@unsri.ac.id

KONTRAK PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN DASAR KOMPETITIF NASIONAL (PDKN)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Tahun Anggaran 2022
Nomor: 0148.012/UN9.3.1/PL/2022

Pada hari ini selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Pulu Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SAMSURYADI. S.Si., M.Kom., Ph.D : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Indralaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, yang berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr LUK LUK FUADAH S.E., M.B.A : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN) Tahun Anggaran 2022 nomor kontrak 142/E5/PG.02.00.PT/2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan Program Penelitian tahun anggaran 2022 yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN) Tahun Anggaran 2022 dengan judul ” **Struktur Kepemilikan dan Pengungkapan Environmental, Social And Governance Berpengaruh Pada Kinerja Perusahaan Dan Nilai Perusahaan: Peran Komite Audit Sebagai Moderasi Di Perusahaan Indonesia**”.

PASAL 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah **Rp 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah)** sudah termasuk pajak, diberikan setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dokumen kontrak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-2 tanggal 22 April 2022.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian;
 2. Surat pernyataan kesanggupan menyusun laporan penelitian;
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
 7. Luaran penelitian.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN) dengan judul ” **Struktur Kepemilikan dan Pengungkapan Environmental, Social And Governance Berpengaruh Pada Kinerja Perusahaan Dan Nilai Perusahaan: Peran Komite Audit Sebagai Moderasi Di Perusahaan Indonesia**”;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap yaitu :
- a. Pembayaran Tahap pertama (70 %) sebesar **Rp 53.900.000,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)** sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** merevisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian telah menggunggah ke laman SIMLITABMAS;
 - b. Pembayaran Tahap kedua (30%) sebesar **Rp 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)** sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Pihak Pertama menerima Dokumen berupa Laporan Kemajuan pelaksanaan Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 16 Agustus 2022.
- c. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- | | | |
|----------------|---|-------------------------------|
| Nama | : | Dr LUK LUK FUADAH S.E., M.B.A |
| Nomor Rekening | : | 0070215684 |
| Nama Bank | : | BNI |
- d. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 6
TARGET LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa publikasi ilmiah pada **jurnal internasional** bereputasi
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 7
LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa revisi proposal penelitian, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan akhir penelitian, dan luaran penelitian atas dana penelitian yang telah di tetapkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman SIMLITABMAS paling lambat **20 November 2022**, dengan melampirkan dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan kemajuan, laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian) pelaksanaan pekerjaan dan luaran wajib penelitian.

- (3) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Bentuk/ukuran kertas A4;
 - Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 142/E5/PG.02.00.PT/2022

PASAL 8

PENCANTUMAN PEMBERI DANA PENELITIAN DALAM PUBLIKASI ILMIAH

PIHAK KEDUA Wajib mencantumkan pada setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini mencantumkan ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor 142/E5/PG.02.00.PT/2022.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

PASAL 10

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 11

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 13
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 15
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

PASAL 16
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

**PASAL 17
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian telah berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 18
LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 19
PENUTUP**

- (1) Kontrak penelitian tahun jamak untuk penelitian lanjutan tahun anggaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.
- (2) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
- (3) Kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



SAMSUKYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NIDN 0004027101

PIHAK KEDUA



Dr LUK LUK FUADAH S.E., M.B.A
NIDN 0011057401

LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL
SKEMA: PENELITIAN DASAR KOMPETITIF NASIONAL

**Struktur Kepemilikan Dan Pengungkapan Environmental, Social and Governance Berpengaruh pada Kinerja Perusahaan dan Nilai Perusahaan:
Peran Komite Audit Sebagai Moderasi Di Perusahaan Indonesia**



Tahun ke 1 dari 2 tahun

Diusulkan Oleh:

Ketua Peneliti : Dr. Luk Luk Fuadah, SE., MBA, Ak., CA. (0011057401)
Anggota Peneliti: 1. Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA. (0010126703)
2. Isni Andriana, S.E., M.Fin, PhD (0001097501)

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022

Ringkasan Penelitian

Corporate social responsibility (CSR) adalah kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan apa yang diinginkan untuk tujuan dan nilai-nilai masyarakat kita. Perusahaan tunduk pada tiga dimensi kewajiban: lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (*Environmental, Social and Governance*). Selanjutnya, *Environmental Social and Governance* (ESG) memberi sinyal informasi mengenai janji perusahaan terhadap masalah kesejahteraan, sosial, dan lingkungan yang berkontribusi dalam menciptakan hubungan yang erat antara pemangku kepentingan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan informasi ESG dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Berkaitan dengan pasar modal, investor dapat mengaitkan nilai yang lebih tinggi dari nilai perusahaan yang sebenarnya karena keterlibatan CSR. Efek penilaian potensial ini memperoleh relevansi dengan meningkatnya kesadaran investor terhadap isu-isu ESG selama beberapa dekade terakhir, yang juga tercermin dalam pertumbuhan yang kuat dalam investasi yang bertanggung jawab secara sosial di seluruh dunia. tanggapan perusahaan bergantung pada keyakinan manajer mengenai manfaat material dari penyesuaian dan penilaian yang baik pada peringkat ESG dan keselarasannya dengan strategi perusahaan.

Pengungkapan ESG memiliki nilai yang relevan dan berfungsi untuk mengurangi masalah informasi asimetris. Dengan demikian, nilai pengungkapan ESG transparan ke pasar keuangan memberikan biaya/manfaat yang dilakukan manajer dalam menentukan tingkat pengungkapan yang optimal untuk perusahaan mereka. Perusahaan yang mengungkapkan ESG menghargai pentingnya keterlibatan etis untuk mencerminkan citra mereka terhadap semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan menghargai pentingnya komunikasi yang transparan dan andal. Penelitian ini mengisi gap terkait penelitian mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (*Environmental, Social and Governance*). **Tujuan utama dari penelitian ini** adalah untuk menguji secara empiris Struktur kepemilikan dan pengungkapan environmental, social and governance berpengaruh pada kinerja perusahaan: peran Komite audit sebagai Moderasi di Perusahaan Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut yaitu untuk: pertama, menguji secara empiris pengungkapan *Environmental Social and Governance* (ESG) pada perusahaan di Indonesia. Kedua, menguji perbandingan pengungkapan *Environmental Social and Governance* (ESG) di ASEAN 5 yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Hal ini untuk melihat bagaimana pengungkapan ESG di tiap negara tersebut serta melakukan kualitatif riset pada 2 perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia (Penelitian tahun kedua).

Luaran wajib berupa publikasi pada jurnal internasional reputasi. **Luaran tambahan** yang ditargetkan, pemakalah temu ilmiah internasional, dan 1 bahan ajar ISBN. **TKT Penelitian** berada pada **level 3** yaitu pembuktian konsep fungsi dan / atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance - ESG*). Kepemilikan asing berperan dalam implementasi lingkungan, sosial, dan tata kelola karena berkontribusi pada proses tersebut. Hal ini sejalan dengan kepemilikan publik yang juga berperan dalam pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, baik kepemilikan negara maupun kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap hasil lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, lingkungan, sosial, dan tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Komite audit memoderasi pengaruh antara Lingkungan, sosial, dan tata kelola dan nilai perusahaan. Namun, komite audit tidak berperan memoderasi dalam pengaruh antara lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, social, and governance -ESG*) dan kinerja perusahaan. Secara keseluruhan, temuan ini mendorong manajer memperhatikan operasi sosial dan tata kelola perusahaan yang baik yang ramah terhadap lingkungan. Hasilnya bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi pemerintah sebagai regulator yang dapat meyakinkan perusahaan untuk mengadopsi praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Keywords;

struktur kepemilikan; pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG); nilai perusahaan; kinerja perusahaan; komite audit

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

HASIL

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai penelitian kuantitatif. Data sekunder yang berasal dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan dari situs web perusahaan dan juga dari Bursa Efek Indonesia atau IDX. Periode penelitian adalah dari 2016-2020, dengan sebanyak 140 perusahaan dan total 700 pengamatan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	SD
Kepemilikan asing	700	0.00	37.8	28.4	23.6
Kepemilikan publik	700	0.04	25.9	19.7	17.9
Kepemilikan negara	700	0.00	68,2	13.9	8.7
Kepemilikan keluarga	700	0.00	45.3	16.5	9.3
ESG	700	8	72,8	39.2	14.5
Komite audit	700	2	4	3,4	2.3

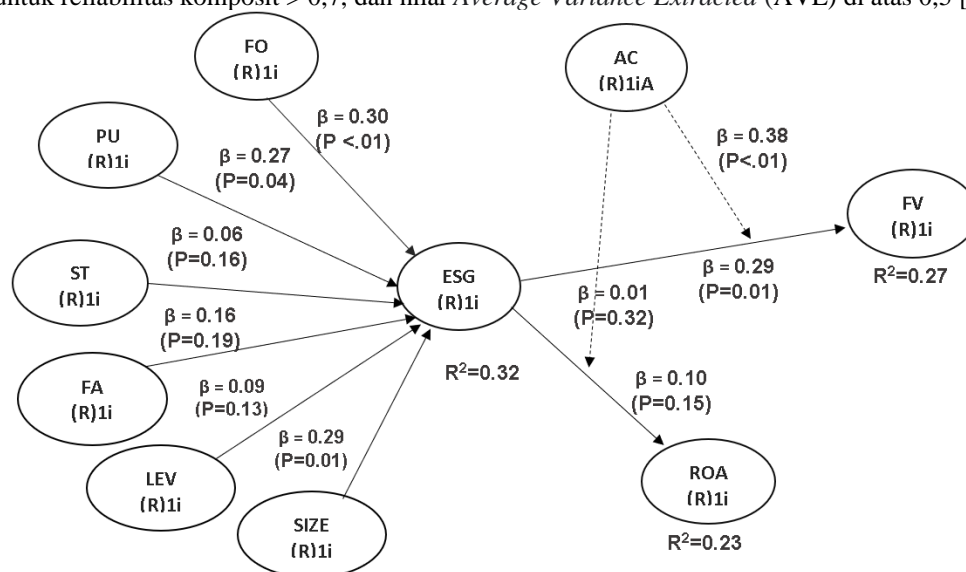
Sumber: output dari SPSS

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas dan validitas

Variabel	Alpha Cronbach	Rho_A	Keandalan Komposit	Ave
Kepemilikan asing	0.713	0,887	0.803	0.587
Kepemilikan publik	0.890	0,842	0.889	0.541
Kepemilikan negara	0.846	0.924	0.863	0.617
Kepemilikan keluarga	0.789	0.873	0.876	0.500
ESG	0.823	0.801	0.815	0.589
Komite audit	0.831	0.899	0.885	0.625

Sumber: output dari SEM PLS

Tabel 1 mengungkapkan terkait dengan statistik deskriptif yang menguraikan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Tabel 2 menguraikan hasil pengujian reliabilitas seluruh variabel dalam penelitian ini. reliabilitas dan validitas penelitian ini memadai, karena nilai alpha Cronbach > 0,6 dan nilai untuk reliabilitas komposit > 0,7, dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* di atas 0,5 [1;2].



Gambar 1. Hasil PLS

Sumber: output dari SEM PLS

Dimana:

FO = Kepemilikan asing, PU = Kepemilikan public; ST = Kepemilikan negara; FA = Kepemilikan keluarga; ESG = Lingkungan, social dan tata Kelola (Environmental, social, and governance); FV = Nilai perusahaan; ROA = Kinerja Perusahaan, Size= ukuran; lev= leverage.

Tabel 3. Hasil dari Koefisien Jalur.

Hipotesis	Koefisien	Nilai p	Hasil
Kepemilikan asing → ESG	0.30	<0.01	Diterima
Kepemilikan publik → ESG	0.27	0.04	Diterima
Kepemilikan negara → ESG	0.06	0.16	Ditolak
Kepemilikan keluarga → ESG	0.16	0.19	Ditolak
ESG → Nilai Perusahaan	0.46	0.01	Diterima
ESG → Kinerja Perusahaan	0.10	0.15	Ditolak
ESG → Nilai Perusahaan → Komite Audit	0.38	<0.01	Diterima
ESG → Kinerja Perusahaan → Komite Audit	0.01	0.32	Ditolak

**level signifikan pada 5% $p < 0,05$ (Sumber: output dari SEM PLS).

Tabel 2 menunjukkan hasil keseluruhan untuk hipotesis. Analisis kami menunjukkan nilai koefisien (β) untuk efek FO → ESG dengan nilai koefisien (β) 0,30 dan nilai $p < 0,01$ kurang dari 0,05 . Hipotesis pertama (H1) diterima. Dengan demikian kepemilikan asing secara positif dan signifikan mempengaruhi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selanjutnya, nilai koefisien (β) terhadap pengaruh PO → ESG adalah 0,27, dan p-value 0,04 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa hipotesis kedua (H2) juga didukung penuh. Dengan demikian, kepemilikan publik secara positif dan signifikan mempengaruhi terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kepemilikan negara → ESG memiliki nilai koefisien (β) sebesar 0,16 dan p-value sebesar 0,19, p-value lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa (H3) ditolak. Kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nilai perusahaan → lingkungan, sosial, dan tata kelola memiliki koefisien (β) sebesar 0,46 dengan p-value sebesar 0,01, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) diterima. Dengan demikian, lingkungan, sosial, dan tata kelola memiliki dampak positif dan signifikan terhadap nilai suatu perusahaan. Kinerja perusahaan → lingkungan, sosial, dan tata kelola memiliki nilai koefisien (β) sebesar 0,10 dengan p-value sebesar 0,15, yang lebih besar dari 0,05. Hipotesis keenam (H6) ditolak. Lingkungan, sosial, dan tata kelola → nilai perusahaan → komite audit memiliki nilai koefisien (β) sebesar 0,38 dengan nilai $p < 0,01$, yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ketujuh (H7) diterima. Komite audit memoderasi pengaruh lingkungan, sosial, dan tata kelola serta nilai perusahaan. Terakhir, lingkungan, sosial, dan tata kelola → kinerja perusahaan → komite audit memiliki koefisien (β) sebesar 0,01 dengan p-value sebesar 0,32, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedelapan (H8) ditolak. Dengan demikian, komite audit tidak memperkuat pengaruh lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap kinerja perusahaan. Komite audit tidak berperan sebagai variable moderasi pada pengaruh ini.

PEMBAHASAN

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kepemilikan asing berdampak positif pada pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social, and governance* (ESG). Ini berarti bahwa semakin besar kepemilikan asing, semakin besar pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa kepemilikan asing secara signifikan dan positif mempengaruhi pengungkapan ESG [3-9]. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG [10-13]. Selain itu, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian [14], yang menyimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak berdampak pada pengungkapan ESG. Penelitian ini mendukung teori legitimasi.

Hipotesis kedua (H2) mengungkapkan bahwa kepemilikan publik mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *environmental, social, and governance* (ESG). Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh [4] yang menyimpulkan bahwa kepemilikan publik secara positif mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, hasilnya tidak sependapat dengan [15] yang menyimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Temuan penelitian ini mendukung teori legitimasi.

Hipotesis ketiga (H3) mengungkapkan bahwa kepemilikan negara berpengaruh positif terhadap pengungkapan *environmental, social, and governance* (ESG). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan negara tidak berdampak pada pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu, hipotesis ketiga ditolak. Temuan ini tidak mendukung penelitian sebelumnya dari [5 dan 9], yang menyimpulkan bahwa kepemilikan negara memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, hasil ini tidak sejalan dengan studi dari [16], yang menyimpulkan bahwa kepemilikan

negara berdampak negatif pada pengungkapan sukarela. Oleh karena itu, temuan ini tidak mendukung teori pemangku kepentingan.

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga secara positif mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hasil penelitian ini tidak didukung. Analisis data untuk hipotesis 4 (Gambar 1 dan Tabel 3) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya [17;18;6; 19] yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Selain itu, kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi *sustainability reporting* [6;18] atau tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan [17]. Selain itu, [19] menemukan bahwa kepemilikan keluarga berdampak negatif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Penelitian ini tidak mendukung teori pemangku kepentingan.

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara positif mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis kelima didukung. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), semakin tinggi nilai perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya [20-25] (Ferrell et al., 2016; Aboud dan Diab, 2018; Kim dkk., 2018; Li dkk., 2018; Syaikh, 2022; Yu et al., 2018) menyimpulkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, temuan ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh [26] dan [27] menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Temuan penelitian ini mendukung teori pemangku kepentingan.

Hipotesis keenam (H6) mengungkapkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis data untuk hipotesis 6 dari Gambar 1 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis keenam ditolak. Temuan ini tidak mendukung penelitian dari [28-31] yang menyimpulkan bahwa efek pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola memiliki positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, hasil ini tidak mendukung penelitian sebelumnya [24;32-34] menyimpulkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Temuan ini tidak mendukung teori pemangku kepentingan.

Hipotesis ketujuh (H7) menyatakan komite audit memoderasi hubungan antara lingkungan, sosial, dan tata kelola dan nilai perusahaan. Namun, analisis data untuk hipotesis 4 (Tabel 3) menunjukkan bahwa lingkungan, sosial, dan tata kelola mempengaruhi nilai perusahaan dan komite audit memoderasi pengaruh ini. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh diterima. Komite audit adalah variabel moderating pada pengaruh Lingkungan, sosial, dan tata kelola serta nilai tegas yang memperkuat hubungannya.

Hipotesis terakhir (H8) menyatakan bahwa komite audit memoderasi hubungan antara lingkungan, sosial, dan tata kelola dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini tidak menemukan signifikansi antara variabel-variabel tersebut, artinya komite audit tidak memperkuat pengaruh kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola serta perusahaan. Dengan demikian, komite audit tidak bertindak sebagai variabel moderating dalam hubungan ini.

Hasil variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan positif dan signifikan. Perusahaan besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada pemangku kepentingan melalui pengungkapan berkelanjutan dan terkait dengan pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, leverage menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Ini berarti bahwa leverage tidak mendukung dan berkontribusi pada pengungkapan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

Hasil analisis (Tabel 3) menunjukkan nilai R Square (R^2) sebesar 0,28 untuk lingkungan, sosial, dan tata kelola, 0,25 untuk nilai perusahaan dan 0,20 untuk kinerja perusahaan. Artinya, 28% lingkungan, sosial dan tata kelola dipengaruhi oleh kepemilikan asing, kepemilikan publik, kepemilikan negara dan kepemilikan keluarga, sedangkan 72% variabel dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang belum dikaji dalam penelitian ini. Nilai R^2 lebih dari 0,5 menunjukkan bahwa model tersebut memiliki ukuran kesesuaian yang baik [2].

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance* -ESG). Kepemilikan asing berperan dalam implementasi lingkungan, sosial, dan tata kelola karena berkontribusi pada proses tersebut. Hal ini sejalan dengan kepemilikan publik yang juga berperan dalam pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, baik kepemilikan negara maupun kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, lingkungan, sosial, dan tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Komite audit memoderasi pengaruh antara Lingkungan, sosial, dan tata kelola dan nilai perusahaan. Namun, komite audit tidak berperan memoderasi dalam pengaruh antara lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, social, and governance* -ESG) dan kinerja perusahaan. Secara keseluruhan, temuan ini mendorong manajer memperhatikan operasi sosial dan tata kelola perusahaan yang baik yang ramah terhadap lingkungan. Hasilnya bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi pemerintah sebagai regulator yang dapat meyakinkan perusahaan untuk mengadopsi praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Implikasi praktis

Hasil dan temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis. Bagi manajer, perusahaan harus lebih transparan terkait masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kegiatan lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan menciptakan nilai bagi perusahaan yang mengungkapkan informasi strategis terkait keberlanjutan. Perusahaan juga dapat menggunakan sumber daya yang terkait dengan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan pendekatan yang efisien dan kuat.

Implikasi bagi pemangku kepentingan, bagi perusahaan yang mengungkapkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hal ini dapat semakin meningkatkan pengawasan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan termasuk pelanggan, investor, Lembaga swadaya masyarakat (*Non Governmental Organization*) dan masyarakat. Kami juga percaya bahwa Lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat membujuk investor untuk berinvestasi di perusahaan yang telah menerapkan.

Implikasi bagi pemerintah, di Indonesia, yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dapat lebih memperjelas peraturan terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang harus diterapkan perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Batasan pertama terkait dengan data sekunder yang memiliki kelemahan. Saran untuk penelitian yang akan datang dapat melakukan penelitian dengan memperoleh data primer. Selain itu, peneliti masa depan dapat melakukan penelitian kualitatif dengan cara wawancara dengan perusahaan yang telah mengungkapkan informasi terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Batasan kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam penelitian ini hanya berfokus pada struktur kepemilikan, termasuk kepemilikan asing, kepemilikan publik, kepemilikan negara dan kepemilikan keluarga. Penelitian lebih lanjut dapat menggunakan variabel lain, seperti tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran, independensi dewan, dan tata kelola perusahaan. Batasan terakhir dari penelitian ini terkait dengan penggunaan dua teori: teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) dan teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*). Penelitian di masa yang akan datang dapat menggunakan perspektif yang berbeda dengan menggunakan teori yang berbeda dalam penelitian mereka.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui BIMA.

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
1	Economies (Scopus)	Review	https://www.mdpi.com/journal/economies- (lampiran)

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
1	Integrated Journal of Business Economics (Sinta 2)	LOA	https://ojs.ijbe-research.com/index.php/IJBE- (lampiran)
1	2 nd Universitas Bangka Belitung Business, and Economics (UBBBEC)	Sertifikat	https://ubbbec.akademisi.co.id/ (lampiran)
2	Draft Buku	Draft	

E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui BIMA.

Tidak ada

F. **KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala pertama terkait dengan data penelitian yaitu data sekunder yang berasal dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan dengan periode selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dimana populasi adalah semua perusahaan listed di Bursa Efek Indonesia. Namun dalam penelitian ini memiliki sampel sebanyak 140 perusahaan sehingga total sebanyak 700 observasi.

Kendala terkait dengan Luaran penelitian utama yang semula pada jurnal: *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*

Namun kami submit pada jurnal: *Economies (Scopus Q2)*.

G. **RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA:** Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Rencana penelitian di tahun berikutnya

1. Untuk menguji perbandingan pengungkapan *Environmental Social and Governance* (ESG) di ASEAN 5 yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Pilipina. Hal ini untuk melihat bagaimana pengungkapan ESG di tiap negara tersebut.
2. Melakukan penelitian kualitatif pada dua (2) perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Semen Baturaja dan PT Bukit Asam untuk meneliti secara detil terkait dengan lingkungan, sosial dan tata Kelola (*Environmental Social and Governance*).

State of the art Penelitian ESG di ASEAN

Tujuan utama dari penelitian [35] adalah untuk menguji adanya hubungan siklik antara pengungkapan *Environmental Social and Governance* (ESG) dan *Corporate Financial Performance* (CFP). Temuan menunjukkan hubungan positif yang terbentuk antara skor pengungkapan ESG dan CFP untuk perusahaan Malaysia. Demikian pula, ada hubungan siklus antara skor pengungkapan ESG dan CFP untuk perusahaan Singapura, tetapi keduanya saling mempengaruhi secara negatif di kedua arah. Sebaliknya, tidak ada hubungan siklik yang terbentuk antara pengungkapan ESG dan CFP untuk perusahaan Thailand [35]. Penelitian [36] bertujuan untuk memberikan wawasan kepada perusahaan tentang pengaruh keuangan pengungkapan ESG terhadap kinerja perusahaan di berbagai negara, yang dapat digunakan oleh perusahaan, dan pemerintah untuk menentukan apakah mereka harus mengungkapkan dan berinvestasi dalam pelaporan ESG. Selain itu, hasil ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi investor dalam menentukan apakah mereka harus berinvestasi dalam pengungkapan ESG atau perusahaan non-pengungkapan, dan bagaimana hal ini berbeda di setiap negara. Pemerintah juga dapat menggunakan informasi ini ketika mereka ingin melakukan investasi aset secara lokal atau di negara ASEAN lainnya.

Penelitian mereka berkontribusi pada teori dan praktik dalam beberapa cara: Pertama, makalah ini mensintesis tantangan integrasi ESG yang paling menonjol tetapi juga kurang sering disebutkan bagi investor. Kedua, Makalah ini berpendapat bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang kutub kesenjangan penelitian-praktik (RPG) menawarkan cara baru untuk mendekati dan mengatasi hambatan integrasi ESG. Ketiga, penelitian menggunakan data primer dan data sekunder [37]. Dualitas CEO menurunkan pengungkapan LST, sementara ukuran dewan, kehadiran perempuan di dewan dan direktur independen pengungkapan yang meningkat pada dampaknya terhadap pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) di negara-negara ASEAN [38]. Skor ESG berpengaruh signifikan terhadap risiko total tetapi tidak secara sistematis di ASEAN-5. Kontroversi LST tidak terlalu mempengaruhi risiko total dan sistematis. (*Board Gender Diversity*-BGD) secara signifikan mempengaruhi risiko total tetapi tidak risiko sistematis. Temuan ini akan membantu investor dan manajer portofolio mengevaluasi bagaimana kinerja LST memengaruhi risiko keuangan perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih baik di ASEAN-5 [39]. Hasil penelitian [40] mengungkapkan bahwa skor lingkungan, skor sosial, skor tata kelola, dan pertumbuhan ekonomi terkait secara positif dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals* -SDGs) negara-negara ASEAN. Artikel saat ini memberikan bantuan kepada peneliti baru saat melakukan penelitian tentang pencapaian SDGs dan memandu pembuat kebijakan saat menetapkan kebijakan terkait pencapaian SDGs melalui ESG.

Penelitian yang akan datang akan menginvestigasikan pengungkapan *Environmental Social and Governance* (ESG) di ASEAN 5 yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan juga kinerja perusahaan. Selain itu juga akan melakukan penelitian kualitatif dengan wawancara pada dua perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia.

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Studi sebelumnya terutama didasarkan pada teori agensi terkait dengan asimetri informasi. Kami menemukan bahwa pengungkapan ESG melembagakan norma-norma pelengkap informal untuk menahan manajemen laba melalui “saluran akuntansi” yang mengurangi ketidakjelasan dan ketidakteraturan keuangan. Sementara hasil kami bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang didasarkan pada asumsi moral hazard [41]. Karena keterbukaan informasi, teori keagenan menunjukkan bahwa ada hubungan yang tinggi antara perilaku etis dan kinerja keuangan [42]. Teori agensi berfokus pada sifat hubungan di mana prinsipal (pemegang saham) memberikan tugas dan tugas kepada agen (manajemen), yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan itu [43]. Oleh karena itu, masalah keagenan muncul ketika konflik kepentingan muncul antara prinsipal dan agen di mana kekuasaan dan kontrol manajer diterapkan untuk keuntungan pribadi mereka [43].

Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Dari perspektif teori pemangku kepentingan, perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial dan memelihara hubungan yang berkelanjutan antara karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk mendorong nilai perusahaan [44]. Dimensi keberlanjutan sosial mencakup urusan sosial masyarakat terkait, hak asasi manusia, dan layanan kesehatan, sedangkan keberlanjutan lingkungan mencakup memperhatikan perubahan lingkungan dan mematuhi peraturan lingkungan. Teori pemangku kepentingan [45] dijelaskan secara luas oleh Freeman dalam artikelnya “Manajemen Strategis, Pendekatan Stakeholder” [46]. Teori pemangku kepentingan telah digunakan untuk menggambarkan sifat perusahaan dan bagaimana ruang dewan memikirkan kepentingan konstituen bisnis.



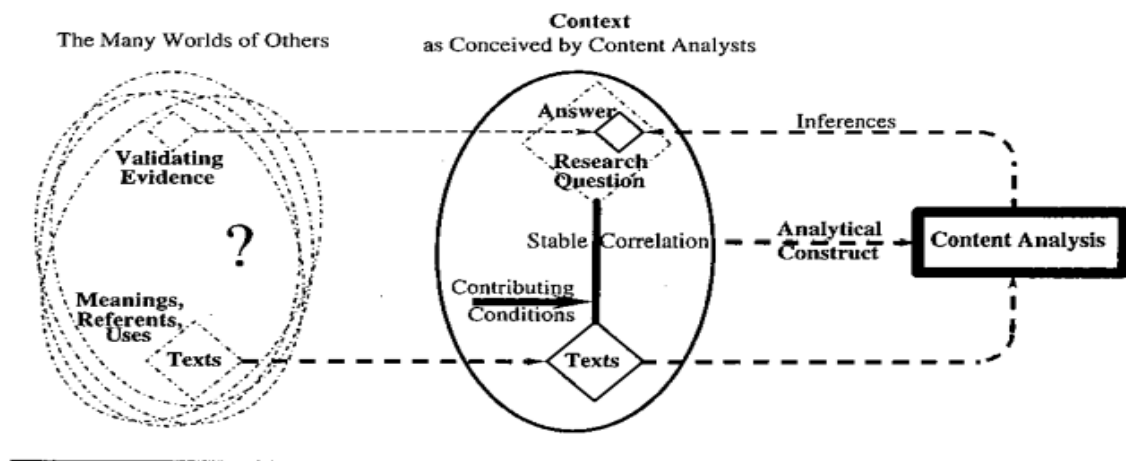
Pengumpulan data

1. Metode Kuantitatif

Data dari perusahaan-perusahaan yang telah mengungkapkan *environmental, social and governance (ESG)* pada negara-negara di ASEAN.

2. Metode Kualitatif

Dengan melakukan *content analysis* dan juga wawancara di satu atau dua perusahaan yang telah mengungkapkan *environmental, social and governance (ESG)* listed di Bursa Efek Indonesia.



Gambar 3. *Content Analysis Answer the Question* (Sumber [47])

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- Hair, J. F., Huli, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). In *Sage Publications*. <https://doi.org/10.1080/1743727x.2015.1005806>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Guo, M., & Zheng, C. (2021). Foreign ownership and corporate social responsibility: Evidence from china. *Sustainability (Switzerland)*, 13(2), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su13020508>
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2012). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal Business Ethics*, 207=223. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2050630>
- Khelif, H., Ahmed, K., & Souissi, M. (2016). Ownership structure and voluntary disclosure: A synthesis of empirical studies. *Australian Journal of Management*, 42(3), 376–403. <https://doi.org/10.1177/0312896216641475>

6. Masud, M. A. K., Nurunnabi, M., & Bae, S. M. (2018). The effects of corporate governance on environmental sustainability reporting : empirical evidence from South Asian countries. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 3(3), 1–26. <https://doi.org/10.1186/s41180-018-0019-x>
7. Bae, S. M., Masud, M. A. K., & Kim, J. D. (2018). A Cross-Country Investigation of Corporate Governance and Corporate Sustainability Disclosure : A Signaling Theory Perspective. *Sustainability*, 10, 1–16. <https://doi.org/10.3390/su10082611>
8. Amidjaya, P. G., & Widagdo, A. K. (2020). Sustainability reporting in Indonesian listed banks: Do corporate governance, ownership structure and digital banking matter? *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 231–247. <https://doi.org/10.1108/JAAR-09-2018-0149>
9. Al Amosh, H., & Khatib, S. F. A. (2021). Ownership structure and environmental, social and governance performance disclosure: the moderating role of the board independence. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 1–18. <https://doi.org/10.1108/jbsed-07-2021-0094>
10. Saini, N., & Singhanian, M. (2019). Performance relevance of environmental and social disclosures: The role of foreign ownership. *Benchmarking: An International Journal*, 26(6), 1845–1873. <https://doi.org/10.1108/BIJ-04-2018-0114>
11. Sharma, P., Panday, P., & Dangwal, R. C. (2020). Determinants of environmental, social and corporate governance (ESG) disclosure: a study of Indian companies. *International Journal of Disclosure and Governance*, 17(4), 208–217. <https://doi.org/10.1057/s41310-020-00085-y>
12. Hasan, A., Hussainey, K., & Aly, D. (2022). Determinants of sustainability reporting decision: evidence from Pakistan. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 12(1), 214–237. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1964813>
13. Abu Qa'dan, M. B., & Suwaidan, M. S. (2019). Board composition, ownership structure and corporate social responsibility disclosure: the case of Jordan. *Social Responsibility Journal*, 15(1), 28–46. <https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2017-0225>
14. Yu, E. P. yi, Guo, C. Q., & Luu, B. Van. (2018). Environmental, social and governance transparency and firm value. *Business Strategy and the Environment*, 27(7), 987–1004. <https://doi.org/10.1002/bse.2047>
15. Nugraheni, P., Indrasari, A., & Hamzah, N. (2022). The Impact of Ownership Structure on CSR Disclosure: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 23(2), 229–243. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i2.14633>
16. Al-Janadi, Y., Abdul Rahman, R., & Alazzani, A. (2016). Does government ownership affect corporate governance and corporate disclosure?: Evidence from Saudi Arabia. *Managerial Auditing Journal*, 31(8–9), 871–890. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2015-1287>
17. Salehi, M., Tarighi, H., & Rezanezhad, M. (2017). The relationship between board of directors' structure and company ownership with corporate social responsibility disclosure: Iranian angle. *Humanomics*, 33(4), 398–418. <https://doi.org/10.1108/H-02-2017-0022>
18. Rudyanto, A. (2017). State Ownership, Family Ownership, and Sustainability Report Quality: The Moderating Role of Board Effectiveness. *GATR Accounting and Finance Review*, 2(2), 15–25. [https://doi.org/10.35609/afr.2017.2.2\(3\)](https://doi.org/10.35609/afr.2017.2.2(3))
19. Rees, W., & Rodionova, T. (2014). The influence of family ownership on corporate social responsibility: An international analysis of publicly listed companies. *Corporate Governance: An International Review*, 23(3), 184–202. <https://doi.org/10.1111/corg.12086>
20. Ferrell, A., Liang, H., & Renneboog, L. (2016). Socially responsible firms. *Journal of Financial Economics*, 122(3), 585–606. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.12.003>
21. Aboud, A., & Diab, A. (2018). The impact of social, environmental and corporate governance disclosures on firm value: Evidence from Egypt. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 8(4), 442–458. <https://doi.org/10.1108/JAEE-08-2017-0079>
22. Kim, W. S., Park, K., & Lee, S. H. (2018). Corporate Social Responsibility , Ownership Structure , and Firm Value : Evidence from Korea. *Sustainability*, 10, 1–20. <https://doi.org/10.3390/su10072497>
23. Li, Y., Gong, M., Zhang, X. Y., & Koh, L. (2018). The impact of environmental, social, and governance disclosure on firm value: The role of CEO power. *British Accounting Review*, 50(1), 60–75. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.09.007>
24. Shaikh, I. (2022). Environmental, Social, and Governance (ESG) practice and Firm Performance: an International Evidence. *Journal of Business Economics and Management*, 23(2), 218–237.
25. Yu, E. P. yi, Guo, C. Q., & Luu, B. Van. (2018). Environmental, social and governance transparency and firm value. *Business Strategy and the Environment*, 27(7), 987–1004. <https://doi.org/10.1002/bse.2047>
26. Ahmad, R. A. R., Ayob, A. A., Zainon, S., & Probodudono, A. N. (2021). The Influence of Environmental, Social and Governance Reporting on Firm Value: Malaysian Evidence. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(9), 1058–1080. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i9/10877>
27. Aouadi, A., & Marsat, S. (2018). Do ESG Controversies Matter for Firm Value? Evidence from International Data. *Journal of Business Ethics*, 151(4), 1027–1047. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3213-8>

28. Boulhaga, M., Bouri, A., Elamer, A. A., & Ibrahim, B. A. (2022). Environmental , social and governance ratings and firm performance : The moderating role of internal control quality. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, June, 1–12. <https://doi.org/10.1002/csr.2343>
29. Brogi, M., & Lagasio, V. (2018). Environmental, social, and governance and company profitability: Are financial intermediaries different? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(3), 576–587. <https://doi.org/10.1002/csr.1704>
30. Kumar, P., & Firoz, M. (2022). Does Accounting-based Financial Performance Value Environmental , Social and Governance (ESG) Disclosures ? A detailed note on a corporate sustainability perspective. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 16(1), 41–72.
31. Mohammad, W. M. W., & Wasiuzzaman, S. (2021). Environmental, social, and governance (ESG) disclosure, competitive advantage and performance of firms in Malaysia. *Cleaner Environmental Systems*, 2(February), 100015. <https://doi.org/10.1016/j.cesys.2021.100015>
32. Buallay, A. (2019). Between cost and value: Investigating the effects of sustainability reporting on a firm's performance. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(4), 481–496. <https://doi.org/10.1108/JAAR-12-2017-0137>
33. Duque-Grisales, E., & Aguilera-Caracuel, J. (2019). Environmental, Social and Governance (ESG) Scores and Financial Performance of Multilatinas: Moderating Effects of Geographic International Diversification and Financial Slack. *Journal of Business Ethics*, 168(2), 315–334. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04177-w>
34. Wasiuzzaman, S., Ibrahim, S. A., & Kawi, F. (2022). Environmental , social and governance (ESG) disclosure and fi rm performance : does national culture matter ? *Meditari Accountancy Research*, 1–27. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2021-1356>
35. Chiek, A. N., Kean, C. C., Hena, L. P. L., & Ling, N. S. (2021). The Cyclic Relationship between Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure and Corporate Financial Performance (CFP) in a Regional Economy. *Journal of Contemporary Issues and Thought*, 11(1), 79–93. <https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JCIT/article/view/5509>.
36. Chin, P. N. (2022). ESG Rating and Firm Performance : Comparison among Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia and Thailand. *International Journal of Accounting, Finance and Business*, 7(43), 155–164. <https://doi.org/10.55573/IJAFB.074311>
37. Friede, G. (2019). Why don't we see more action? A metasynthesis of the investor impediments to integrate environmental, social, and governance factors. *Business Strategy and the Environment*, 28(6), 1260–1282. <https://doi.org/10.1002/bse.2346>
38. Mashudi, Khoiriawati, N., & Nuswantara, D. A. (2021). Board Characteristics and Disclosure of Environmental, Social, and Governance (ESG) Matters: Evidence From ASEAN Countries. *Review of Business, Accounting and Finance*, 1(4), 374–391.
39. Rahma, N., & Rokhim, R. (2022). Is There any Effect of ESG Performance in the Improvement of Financial Risk in ASEAN-5? *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, 3(2), 61–65. <https://doi.org/10.46336/ijqrm.v3i2.274>
40. Sadiq, M., Ngo, T. Q., Pantamee, A. A., Khudoykulov, K., Thi Ngan, T., & Tan, L. P. (2022). The role of environmental social and governance in achieving sustainable development goals: evidence from ASEAN countries. *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2072357>
41. Jin L, Myers SC. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. *J financ econ.*;79(2):257-292. doi:10.1016/j.jfineco.2004.11.003
42. Chouaibi S, Rossi M, Siggia D, Chouaibi J. (2022). Exploring the moderating role of social and ethical practices in the relationship between environmental disclosure and financial performance: evidence from esg companies. *Sustainability.*;14(1):1-17. doi:10.3390/su14010209
43. Eisenhardt KM. (1989). Making Fast Strategic Decisions in High-Velocity Environments. *Acad Manag J.*;32(3):543-576. doi:10.2307/256434
44. Yuan, X., Li, Z., Xu, J., Shang, L., (2022). ESG disclosure and corporate financial irregularities – Evidence from Chinese listed firms, *Journal of Cleaner Production*, 1-11.
45. Freeman RE. (1984). *Stakeholder Theory of Modern Corporation*. Boston, Pittman;
46. Freeman, E., (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139192675>. Cambridge University Press
47. Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Sage Publications*. <http://www.uk.sagepub.com/textbooks/Book234903>